

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena kualitas laporan keuangan merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena laporan keuangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) belum semuanya menerapkan standar yang berlaku secara umum mengenai pelaporan keuangannya. Seiring dengan perkembangan akuntansi, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja suatu organisasi menjadi suatu tuntutan yang umum. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntansi adalah menguatnya tuntutan atas kualitas laporan keuangan. Para pemangku kepentingan memerlukan informasi yang bermanfaat dan memiliki nilai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Yunira Sedani Kadek dkk (2018) bahwa pada dasarnya Tri Hita Karana yang menekankan bahwa kesejahteraan dapat dicapai bila terealisasi hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), dengan sesama manusia (*pawongan*) dan alam lingkungan (*palemahan*). Untuk lebih jelasnya maka akan dijelaskan secara spesifik terkait perspektif Tri Hita Krana itu sendiri sebagai berikut.

Perspektif parhayangan, (*sraddha*) dan ketakwaan (*bhakti*) kepada Tuhan. Keimanan dalam hal ini berarti keyakinan akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur alam semesta beserta isinya. Sedangkan bhakti artinya sujud dan cinta pada Tuhan.

Perspektif pawongan dalam budaya Tri Hita Karana perlu terciptanya dan atau dijaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan stakeholder-nya dalam situasi di kantor, desa pakraman, pemerintah dan lingkungan sosial

Perspektif palemahan Perusahaan harus menyelaraskan tanggung jawab ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk melihat keterkaitannya maka peneliti tertarik untuk melihat implementasi penerapan Tri Hita Karana terhadap rencana pengelolaan LPD.

Secara teoritis, Suardikha, (2011) menjelaskan bahwa Tri Hita Karana merupakan tradisi masyarakat Hindu di Bali. Tradisi ini dilaksanakan baik secara kelompok maupun individu dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini mengedepankan prinsip kebersamaan, kerukunan, dan keseimbangan tercermin dalam tiga dimensi, yaitu parahyangan, pawongan. dan palemahan. Secara empiris, (Kepramareni, Sudarma, Irianto, & Rahman, 2014) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dilaksanakan dengan tanggung jawab secara holistik. Hal ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban dilakukan dengan memperhatikan hubungannya dengan manusia, lingkungan, dan Tuhan. (Magesh & Prasad, 2015) menyimpulkan bahwa emosi dan spiritual berjalan seimbang dan hubungan individu dengan organisasi di sekitarnya dapat dibangun. Hubungan yang harmonis ini akan membantu meningkatkan kualitas dalam laporan keuangan dengan adanya integritas pemimpin perusahaan. Budaya Tri Hita Karana dipandang perlu dan dapat meningkatkan Kualitas dari Laporan Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari

penelitian yang dilakukan oleh Widia,W.& Dewi, R. K. (2007), bahwa apabila pemahaman akan Budaya Tri Hita Karana meningkat maka Kualitas Laporan Keuangan juga akan meningkat

Secara teoritis, (Sumodiningrat, 1999) menyatakan bahwa good corporate governance adalah upaya sebagai pemimpin yang baik. Secara empiris, (Sahay & Kumar, 2015) menyatakan bahwa good corporate governance sangat relevan dan penting dilakukan, bahkan hal ini dicantumkan dalam kitab suci di India. Manajer memiliki potensi dan memiliki pengaruh secara signifikan dalam tata kelola perusahaan dengan dampaknya pada kualitas dalam laporan keuangan perusahaan (Cohen, Krishnamoorthy, & Wright, 2004). Hal ini didukung oleh penelitian (Mulyawan, Wirama, & Badera, 2017) yang menemukan good corporate governance secara positif mempengaruhi kinerja LPD. Penelitian (Emile, Ragab, & Kyaw, 2014) mendapatkan hasil bahwa pentingnya praktik good corporate governance bagi perusahaan. Berdasarkan penelitiannya, bahwa good corporate governance mampu membut resiko semakin berkurang, investor semakin tertarik pada perusahaan dan kinerja perusahaan mengalami peningkatan. Selain itu juga, keandalan laporan keuangan juga terpengaruh oleh adanya penerapan good corporate governance (Novatiani & Fatimmah, 2013).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan LPD yaitu Sumber Daya Manusia (Indriasari, 2008; Dewi, 2015; dan Gumelar, 2017). Emilda (2014) mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan kunci atau patokan dari keberhasilan sebuah sesuatu perusahaan,

suatu perusahaan memiliki nilai yang baik disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan oleh Indriasari (2008) yang menemukan bahwa bukti empiris bahwasanya kualitas Sumber Daya Manusia dikota Palembang dan Ogan Ilir tidak berpengaruh signifikan terhadap keteranandalan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) sejalan dengan penelitian Gumelar (2017)

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan adalah penerapan manajemen risiko dalam perusahaan (ERM). Bell et al. (1997) dan Kochetova-Kozloski & Messier (2011) menemukan dalam penelitiannya bahwa umumnya proses audit dan proses pelaporan keuangan mendapatkan manfaat dari adopsi ERM melalui efek informasi. Wawancara semi terstruktur juga dilakukan oleh Cohen et al. (2014) menjelaskan bahwa hubungan antara ERM dan kualitas akuntansi dari survey yang telah dilakukan yaitu adopsi ERM memungkinkan CFO dan auditor untuk lebih efektif menilai kesesuaian estimasi, yang mengarah pada peningkatan kualitas proses pelaporan keuangan dan kekuatan control internal.

Dalam pelaksanaan manajemen risiko, pihak manajemen risiko membutuhkan berbagai macam informasi mengenai kegiatan perusahaan dan

risiko apa saja yang terkandung didalamnya. Salah satu informasi yang berperan dalam pengidentifikasian dan pengukuran risiko adalah informasi yang berasal dari laporan keuangan. Dalam proses pengidentifikasian risiko, pihak manajemen risiko membutuhkan informasi yang cepat dan akurat, agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan keputusannya, jadi dibutuhkan laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, dapat dimengerti dan handal. (John J. Wild, K.R. Suburmanyam, dan Robert F. Halsey, 2008:13). Dengan menggunakan analisis laporan keuangan dapat diketahui hasil-hasil financial yang telah dicapai dimasa lalu, sehingga dapat diketahui kelemahan atau risiko yang dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik. Hasil analisis historis tersebut sangat penting artinya bagi perbaikan penyusunan rencana yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Dengan mengetahui risiko yang dimiliki oleh perusahaan, dapat diusahakan penyusunan rencana yang lebih baik untuk meminimalisir risiko tersebut, sedangkan untuk hasil-hasil yang dianggap baik tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa-masa mendatang. (Yuli Orniati)

Lembaga keuangan mikro (LKM) yang memiliki kearifan lokal seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dalam era otonomi seperti saat ini memiliki peran strategis dalam mengembangkan usaha mikro dan pengurangan tingkat kemiskinan. Dengan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), tentunya diharapkan akan mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan akan permodalan. LPD tersebar di seluruh Kabupaten di Bali salah satunya yaitu Kabupaten Jembrana, dimana jumlah LPD yang ada di Kabupaten Jembrana menurut data LPLPD tahun 2021 sebanyak 64 LPD yang terbagi

menjadi 5 Kecamatan, berikut merupakan tabel jumlah LPD dan data kesehatan LPD yang ada di Kabupaten Jembrana.

Tabel. 1.1
Jumlah LPD dan Data Kesehatan LPD di Kabupaten Jembrana

No	Nama Kecamatan	Jumlah LPD	Data Kesehatan			
			Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat
1	Kecamatan Mendoyo	19	19	-	-	-
2	Kecamatan Pekutatan	13	13	-	-	-
3	Kecamatan Melaya	13	11	1	-	1
4	Kecamatan Negara	10	9	-	-	1
5	Kecamatan Jembrana	9	9	-	-	-
Jumlah		64	61	1	-	2

Sumber : LPLPD Kabupaten Jembrana, 2015

No	Nama Kecamatan	Jumlah LPD	Data Kesehatan			
			Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat
1	Kecamatan Mendoyo	19	14	2	3	-
2	Kecamatan Pekutatan	13	12	-	1	-
3	Kecamatan Melaya	13	12	-	1	-
4	Kecamatan Negara	10	7	2	1	-
5	Kecamatan Jembrana	9	7	1	-	1
Jumlah		64	52	5	6	1

Sumber : LPLPD Kabupaten Jembrana, 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah LPD	Data Kesehatan			
			Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat
1	Kecamatan Mendoyo	19	11	1	3	4
2	Kecamatan Pekutatan	13	11	1	1	-
3	Kecamatan Melaya	13	10	2	-	1
4	Kecamatan Negara	10	7	2	1	-
5	Kecamatan Jembrana	9	7	-	-	2
Jumlah		64	46	6	5	7

Sumber : LPLPD Kabupaten Jembrana, 2022

Dilihat dari tabel di atas terdapat 64 LPD yang terdaftar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan perbandingan data pada tabel tersebut terdapat perubahan tingkat kesehatan yang cukup signifikan untuk LPD di seluruh

Kabupaten Jembrana dari tahun 2015, 2021 dan 2022. Di Tahun 2022 terdapat 46 LPD dengan kondisi sehat, 6 LPD dengan kondisi cukup sehat, 5 LPD dengan kondisi kurang sehat dan 7 LPD dengan kondisi tidak sehat. Berdasarkan data tersebut juga dapat dilihat bahwa Kecamatan Mendoyo merupakan Kecamatan yang paling banyak memiliki LPD yaitu sebanyak 19 LPD dibandingkan dengan Kecamatan lain dan memiliki 11 LPD dengan kondisi sehat, 1 LPD dengan kondisi cukup sehat dan 3 LPD dengan kondisi yang kurang sehat dan 4 LPD dengan kondisi tidak sehat.

Berdasarkan data yang disajikan beberapa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengalami permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap keberlangsungan dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang telah dinyatakan sehat. Para pemangku kepentingan memerlukan informasi yang bermanfaat dan memiliki nilai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. *Good Corporate Governance* atau disingkat GCG menjadi hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan dan masih merupakan studi yang menarik untuk dilakukan, GCG dapat membantu dalam pencegahan skandal perusahaan, penipuan dan kejahatan. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Muliawan Hadad menyatakan bahwa GCG menjamin pengembangan bisnis dan penting jika keberlangsungan bisnis dipertahankan (D.Afrianto., 2017). Pelaksanaan GCG yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan.

Semakin berkembangnya LPD meskipun dikatakan telah dikelola dengan baik tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kasus kecurangan akuntansi, ada beberapa LPD mengalami kasus kecurangan akuntansi yang dilakukan baik oleh ketua maupun oleh pegawai LPD itu sendiri. Berdasarkan Hasil survey awal peneliti terdapat beberapa contoh kasus kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD yang ada di Kabupaten Jemberana seperti pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel. 1.2

Kasus Kecurangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Jemberana

No	Nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	Jenis Kasus	Jumlah Kerugian
1	LPD Desa Adat Taman Sari Munduk Anyar (Kecamatan Mendoyo)	Kasus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pengurus LPD yang terjadi pada tahun 2016.	Kerugian sebesar Rp. 80.000.000
2	LPD Desa Adat Mendoyo Dauh Tukad (Kecamatan Mendoyo)	Kasus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pengurus LPD yang terjadi pada tahun 2017.	Kerugian sebesar Rp. 143.000.000
3	LPD Desa Adat Tuwed (Kecamatan Melaya)	Kasus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pengurus LPD yang terjadi pada tahun 2020	Kerugian sebesar Rp. 800.000.000

Sumber : data diolah (2022)

Secara umum Lembaga Perkreditan Desa (LPD), memang masih terbatas dalam pengembangan usaha dan juga membantu usaha mikro dalam pengembangan usahanya. Kompetensi Sumber Daya Manusia Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di beberapa lokasi seperti dikecamatan Negara dan

Jembrana semakin membaik karena telah dilakukan pelatihan, namun masih banyak yang perlu ditingkatkan. Pengungkapan risiko menjadi alat komunikasi antara stakeholder dengan perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan. Pengungkapan risiko merupakan dasar praktik akuntansi dan investasi, supaya dalam melaporkan laporan keuangan tidak hanya melaporkan informasi terkait keuangan saja, namun juga mengungkapkan risiko yang ada dalam perusahaan. Hal penting yang harus disadari dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak boleh dikelola sama seperti bank pada umumnya. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki kekhasan dan karakteristik sendiri di mana lembaga ini lebih kental budaya dan adat istiadat masyarakat Bali. Kepercayaan masyarakat Bali kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) melekat karena masyarakat Bali menjadi anggota adat, budaya, dan agama yang terikat tidak saja terkait hubungan personal pengurus dan anggota masyarakat, tetapi juga kepercayaan terhadap Agama Hindu Bali. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali memiliki keunikan dalam operasionalnya, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali kental dengan unsur-unsur kearifan lokal. Salah satunya, kearifan lokal Tri Hita Karana. Konsep Tri Hita Karana berasal dari kebudayaan masyarakat di Bali. Tri Hita Karana (tiga hal untuk mencapai kesejahteraan hidup) merupakan filosofis pola keserasian dan keseimbangan hubungan yang harmonis. Situasi operasional Lembaga Perkreditan Desa (LPD) disesuaikan dengan kearifan lokal mencerminkan keinginan pemerintah tidak hanya sekedar memajukan perekonomian tetapi juga melestarikan budaya dan seni (kearifan lokal) di Bali (Damayanthi, 2011).

Berdasarkan penjelasan di atas mengindikasikan bahwa belum optimalnya pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di kabupaten Jembrana yang berakibat pada buruknya kualitas laporan keuangan, hal ini dapat diketahui dari masih banyaknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang di bawah kategori sehat dan macet. Kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) perlu ditingkatkan, dalam usaha menjaga eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga kultural dan perannya membangun ekonomi desa pakraman. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berusaha mengkaji hubungan ***“Kualitas Laporan Keuangan ditinjau dari budaya Tri Hita Karana, Good Corporate Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Jembrana”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat diidentifikasi masalah, sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat kualitas laporan keuangan yang kurang dari standar akuntansi yang menyebabkan kurangnya tingkat akuntabilitas dari laporan keuangan beberapa LPD di Kabupaten Jembrana.
- 2) Rendahnya penerapan *Good Corporate Governance* pada beberapa Lembaga perkreditan desa (LPD) di kabupaten jembrana, dimana inti dari GCG yang baik terletak pada sikap dan perilaku kepemimpinan sebagai faktor internal yang menjadi kendali dalam kesuksesan implementasi dari GCG.

- 3) Rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh beberapa LPD menyebabkan beberapa LPD di kabupaten Jember kurang optimal didalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 4) Kurangnya penerapan manajemen resiko didalam pelaksanaan kegiatan usaha LPD menyebabkan beberapa LPD kurang dapat memprediksi resiko usaha yang mungkin akan dapat ditemui di masa depan.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah yang dapat peneliti jelaskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar kualitas laporan keuangan, *Good Corporate Governance*, kualitas sumber daya manusia, dan manajemen resiko pada LPD Kabupaten Jember.
2. Informasi yang disajikan yaitu : pengaruh dari budaya Tri Hita Karana terhadap kualitas laporan keuangan, *Good Corporate Governance*, kualitas sumber daya manusia, dan manajemen resiko pada LPD Kabupaten Jember.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Budaya Tri Hita Karana berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kabupaten Jembrana?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kabupaten Jembrana?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kabupaten Jembrana?
4. Apakah Manajemen Resiko berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kabupaten Jembrana?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Budaya Tri Hita Karana terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kabupaten Jembrana.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kabupaten Jembrana.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kabupaten Jembrana
4. Untuk menganalisis pengaruh Manajemen Resiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kabupaten Jembrana.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.6.1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan refrensi dari penelitian lain yang akan melakukan penelitian berhubungan dengan masalah yang sama, sehingga penulis juga berharap dapat memberikan suatu manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

1.6.2) Manfaat Praktis

a. Bagi LPD

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dengan Budaya Tri Hita Karana, pelaksanaan GCG, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan manajemen resiko sehingga kegiatan usaha yang dilakukan pada LPD dapat berjalan dengan baik dan lancar.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan tambahan refrensi dan dijadikan acuan terkait kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga keuangan.

c. Bagi masyarakat/pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya kualitas

laporan keuangan berdasarkan budaya Tri Hita Karana, *Good Corporate Governance* dalam menentukan arah kebijakan usaha, perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen resiko dalam mengelola resiko yang mungkin dapat terjadi di masa depan.

1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan-penjelasan yang diuraikan pada tesis ini terdapat beberapa istilah atau singkatan yang digunakan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. LKM : Lembaga Keuangan Mikro
2. LPD : Lembaga Perkreditan Desa
3. LPLDP : Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa
4. GCG : *Good Corporate Governance*
5. BTHK : Budaya Tri Hita Karana
6. KSDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia
7. MR : Manajemen Resiko
8. KLK : Kualitas Laporan Keuangan

1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian atau anggapan dasar dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Pendapat yang diungkapkan oleh Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, dijelaskan asumsi atau

anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti.

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Budaya Tri Hita Karana (BTHK) berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Jembrana, Budaya Tri Hita Karana berpengaruh terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Jembrana, Budaya Tri Hita Karana berpengaruh terhadap Manajemen Risiko (MR) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Jembrana. BTHK berpengaruh terhadap Kualitas laporan Keuangan (KLK) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Jembrana, GCG berpengaruh terhadap KLK Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Jembrana, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Jembrana, Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Jembrana.

1.9 Rencana Publikasi

Penelitian ini akan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) – S2.